
Framing Pernyataan Sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta Dalam Kasus AGH

Johanes Sutanto¹, Finsensius Yuli Purnama^{2*}

¹Universitas Paramadina, Jakarta, DKI Jakarta

²Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Jawa Timur

*email: finsensius@ukwms.ac.id

Abstract. Framing analysis in media research has evolved rapidly, but its application to press releases or public relations statements remains limited. This study aims to analyze the framing of SMA Tarakanita 1 Jakarta's position statement regarding the AGH case, involving legal action against Mario Dandy Satriyo (20) for the alleged assault on David Ozora (17). Using a qualitative descriptive approach and Robert N. Entman's framing analysis method, this study examines how SMA Tarakanita 1 Jakarta selects and emphasizes certain aspects of the crisis stemming from AGH's alleged involvement. In addition to analyzing the primary data—the text of the position statement—the researcher conducted several in-depth interviews with the Head of the Tarakanita Crisis Center (TCC) to comprehensively explore the framing and agenda-setting processes. The research findings reveal that SMA Tarakanita 1 Jakarta framed its position statement in the AGH case by defining the event using moral values and law as a way of defining the problem, making moral judgments, and recommending actions. This relates to the school's efforts to maintain a good image and treat it as crisis management. The interview also revealed Tarakanita's potential as a public relations model for educational institutions in crisis management through the Tarakanita Crisis Center (TCC), which aims to maintain the organization's reputation and image while handling crises effectively. This underscores the importance of strategic communication and crisis response mechanisms in maintaining organizational integrity amidst challenges.

Keywords: Framing analysis, public relations, crisis communication, communication strategy, Tarakanita's position statement

Pendahuluan

Perkembangan riset analisis framing sudah umum digunakan dalam penelitian media, sehingga hasil kajian analisis framing yang dilakukan oleh media telah menjamur. Kita bisa dengan mudah menemukannya, tetapi analisis framing terkait siaran pers atau pernyataan resmi suatu organisasi masih jarang dilakukan. Penggunaan analisis framing dalam penelitian hasil framing Public Relations (PR) dalam bentuk siaran pers atau pernyataan resmi masih minim.

Padahal, seorang Public Relations (PR) atau humas organisasi sangat penting untuk menerapkan framing pada siaran pers atau pernyataan resmi organisasi tempat mereka bekerja. Pembingkai pesan memiliki peran sentral dalam aktivitas Public Relations. Framing adalah aktivitas yang mengkonstruksi realitas sosial dengan tujuan menghadirkan makna tertentu terhadap suatu persoalan (Hallahan, 1999; Zoch & Molleda, 2006). Tujuan framing adalah memengaruhi opini publik dan sudut pandang media, sehingga tercipta citra yang positif terhadap organisasi (Kriyantono, 2014). Secara khusus, penelitian ini berupaya menggunakan metode analisis framing untuk menganalisis pembingkai kasus yang melibatkan AGH dalam surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak public relations SMA Tarakanita 1 Jakarta.

Awal tahun 2023, publik dikejutkan oleh kasus penganiayaan anak di bawah umur yang menimpa siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Jakarta (SMA PL) bernama Crystalino David Ozora (17) oleh pelaku utama Mario Dandy Satriyo (20), yang melibatkan Shane Lukas dan Agnes Gracia Haryanto (AGH). Peristiwa tersebut terjadi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, tepatnya pada Senin, 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WIB. Kasus penganiayaan ini, yang melibatkan Jonathan Latumahina sebagai pengurus GP Ansor DKI Jakarta, menyeret instansi pemerintah dan institusi pendidikan, sehingga mereka "dipaksa" oleh keadaan untuk segera melakukan klarifikasi.

Instansi pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Arbi, 2023). Sementara itu, institusi pendidikan yang turut terseret adalah SMA Taruna Nusantara (TN) Magelang, Universitas Prasetiya Mulya, SMA Pangudi Luhur (PL) Jakarta, SMA Tarakanita 1 Jakarta, SMAK Tirtamarta-BPK Penabur Pondok Indah, dan SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta.

Di ranah institusi pendidikan, dengan latar belakang desakan netizen Twitter yang viral dan publikasi media, klarifikasi demi klarifikasi pun dikeluarkan. Pertama, SMA Taruna Nusantara (TN) Magelang menegaskan bahwa Mario Dandy Satriyo tidak melanjutkan pendidikan dan resmi pindah dari SMA Taruna Nusantara pada 5 Juli 2021, setelah hanya sempat bersekolah hingga kelas 2 SMA. Klarifikasi dari SMA Taruna Nusantara ini dikeluarkan pada 23 Februari 2023.

Selain itu, Universitas Prasetiya Mulya juga mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi keputusan untuk mengeluarkan Mario Dandy Satriyo, salah satu mahasiswanya yang terlibat dalam kasus penganiayaan. Pernyataan resmi universitas tersebut dikeluarkan pada 24 Februari 2023. SMA Pangudi Luhur Jakarta juga mengeluarkan klarifikasi yang berisi bantahan atas kabar yang menyebut Mario Dandy Satriyo (20) sebagai alumninya pada 24 Februari 2023 (Permana, 2023 dan Karunia, 2023).

Setelah ada pernyataan resmi dari SMA Taruna Nusantara (TN) Magelang, Universitas Prasetiya Mulya, dan SMA Pangudi Luhur (PL) Jakarta, publik masih penasaran dan menantikan klarifikasi dari SMA Tarakanita 1 Jakarta. Klarifikasi terkait keterlibatan peserta didik SMA Tarakanita 1 Jakarta, Agnes Gracia Haryanto (AGH), dalam penganiayaan yang status hukumnya belum jelas saat itu memang bukan perkara mudah. Pernyataan resmi tidak bisa dikeluarkan sembarangan karena harus mempertimbangkan banyak aspek. Proses framing diperlukan agar pernyataan resmi tidak blunder atau justru menimbulkan serangan balik.

SMA Tarakanita 1 Jakarta menjadi sekolah terakhir yang memberikan pernyataan sikap dalam kasus penganiayaan David Ozora. Klarifikasi dari pihak sekolah dikeluarkan pada 24 Februari 2023 (Noviansah, 2023). Sementara itu, SMAK Tirtamarta-BPK Penabur Pondok Indah dan SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi.

Pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta terkait AGH ini menarik untuk dianalisis karena dalam kasus ini terdapat dua pernyataan sikap yang dikeluarkan. Yang pertama, pada tanggal 24 Februari 2023, berisi pengakuan bahwa Agnes Gracia Haryanto adalah siswi mereka serta penegasan bahwa pihak sekolah telah mengambil tindakan sesuai dengan aturan sekolah dan memperhatikan undang-undang terkait, seperti perlindungan anak. Yang kedua, pada 2 Maret 2023, berisi pernyataan bahwa pihak

sekolah telah menerima surat pengunduran diri AGH sebagai siswi SMA Tarakanita 1 Jakarta secara resmi pada tanggal 28 Februari 2023.

Sejumlah penelitian terdahulu yang menganalisis framing terkait siaran pers dan pernyataan resmi organisasi antara lain adalah penelitian oleh Ibad (2016) dalam "Analisis Framing Berita Banjir oleh Humas di Website Pemerintah Kota Samarinda." Penelitian ini menganalisis pembingkai berita banjir oleh humas di website Pemerintah Kota Samarinda dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengacu pada konsep analisis framing dari Zhongdan Pan dan Gerald M., yang mengoperasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan pembingkai pesan pada berita banjir di website mereka. Kegiatan pembingkai berita banjir tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi humas dan sesuai dengan tugas serta peran jangka pendek dan jangka panjang humas, serta melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan teori asimetris dua arah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aris, Hartiana, & Revia SF (2018) dengan judul "Bingkai Krisis QZ8501 pada Press Release AirAsia Indonesia yang Dimuat dalam Situs Website www.qz8501.airasia.com." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkai krisis QZ8501 yang dilakukan oleh maskapai penerbangan AirAsia Indonesia dalam berbagai siaran press release pasca kecelakaan pesawat penerbangan QZ8501.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis framing menurut Robert Entman untuk melihat bagaimana pihak maskapai penerbangan AirAsia Indonesia menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu isu terkait dengan krisis akibat kecelakaan pesawat QZ8501. Melalui analisis framing Robert Entman, peneliti menemukan satu frame besar, yakni krisis QZ8501 dianggap sebagai musibah yang menimpa maskapai penerbangan AirAsia Indonesia. Selain digunakan sebagai pijakan yang mendasari berbagai penulisan siaran press release, framing krisis tersebut juga dimanfaatkan oleh maskapai penerbangan AirAsia Indonesia sebagai strategi perbaikan citra untuk mengatasi berbagai pemberitaan negatif yang muncul di media massa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sofyan (2021) dengan judul "Respon Krisis Pemerintah Provinsi Bengkulu di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Framing Terhadap Press Release Pemprov Bengkulu Periode Maret - Desember 2020)." Penelitian ini menganalisis pembingkai atau framing yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyampaikan responnya selama pandemi Covid-19. Fokus penelitian ini adalah pada press release yang dikeluarkan oleh Pemprov Bengkulu melalui website resminya (bengkuluprov.go.id) selama periode Maret hingga Desember 2020.

Dari 422 rilis mengenai Covid-19 yang dikumpulkan, peneliti memilih 14 press release sebagai unit analisis dengan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembingkai respon krisis yang dominan digunakan Pemprov Bengkulu adalah *rectification*, di mana Pemprov Bengkulu lebih banyak menunjukkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis lanjutan. Langkah antisipasi tersebut ditonjolkan melalui beberapa hal, seperti langkah preventif terhadap penyebaran Covid-19, upaya penegakan hukum,

pemberian fasilitas dan pelayanan untuk menunjang aspek kesehatan, serta pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak. Strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pemprov Bengkulu juga sejalan dengan keenam prinsip CECR, yakni *be first, be right, be credible, express empathy, promote action, dan show respect*.

Penelitian keempat dilakukan oleh Hidayat (2021) dengan judul “Personal Branding dalam Komunikasi Publik Pemerintah: Analisis Framing Karakter Personal Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam Siaran Pers Kementerian Tahun 2020.” Penelitian ini berupaya menjelaskan karakter yang disajikan dalam siaran pers lembaga mengenai menteri atau kepala lembaga yang menggunakan sebutan khusus. Analisis framing menurut Entman digunakan untuk menganalisis siaran pers yang ditemukan melalui fitur Google Search, serta mempertimbangkan jumlah pengakses.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat gambaran kesengajaan untuk menampilkan *personal branding* yang melekat pada latar belakang atau pengalaman menteri di *website* masing-masing kementerian yang diamati. Melalui siaran pers, *personal branding* dapat disampaikan secara utuh, dan peluang untuk menjangkau lebih banyak publik meningkat jika disajikan melalui *website*.

Penelitian kelima dilakukan oleh Prasetya (2018) dengan judul “Analisis Framing terhadap Pernyataan Resmi Kemenpora RI dan PSSI dalam Kasus Sanksi FIFA terhadap Indonesia.” Penelitian ini menganalisis bingkai pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam konteks sanksi FIFA. Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *define problem* dan *defining causes*, kedua organisasi saling menyalahkan, dengan menyatakan bahwa sanksi FIFA adalah hasil dari buruknya kinerja organisasi. Dalam *making moral judgement*, kedua organisasi menunjukkan upaya keras yang telah dilakukan dan mengambil contoh dari tata kelola sepak bola di negara lain sebagai data untuk menyalahkan pihak tertentu. Sementara itu, dalam *treatment recommendation*, PSSI fokus pada nasib tim nasional Indonesia, sementara Kemenpora RI fokus pada perbaikan tata kelola persepakbolaan Indonesia.

Sejalan dengan penelitian kelima di atas, tulisan ini bertujuan menganalisis pembingkai (*framing*) pesan yang dilakukan oleh SMA Tarakanita 1 dalam pernyataan sikapnya terkait kasus Agnes Gracia Haryanto (AGH). Pernyataan sikap dengan *framing* khusus dilakukan sebagai bagian dari strategi komunikasi organisasi yang sedang menghadapi krisis. Hasil *framing* SMA Tarakanita 1 terwujud dalam pernyataan sikap tertulis yang disampaikan kepada publik dan dipublikasikan di sejumlah media. Pernyataan sikap tertanggal 24 Februari 2023 dan 2 Maret 2023 menjadi sumber data primer untuk analisis ini.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya fokus pada analisis teks pernyataan sikap sebagai data primer, tetapi juga dilengkapi dengan in-depth interview dengan informan Tarakanita, yakni Ketua Tarakanita Crisis Center (TCC), untuk memahami framing secara komprehensif beserta *agenda setting* yang dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipahami sebagai metode yang menjelaskan fenomena secara mendalam

melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:56). Penjelasan mendalam ini penting karena data tidak dapat berbicara sendiri. Dengan demikian, penelitian yang kaya data akan kehilangan makna jika tidak disusun dalam struktur yang bermakna (Salim, 2006:20). Proses pemaknaan atau interpretasi ini mencakup analisis melalui tiga komponen: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing and verification). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas yang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antarvariabel (Kriyantono, 2006:69).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing menurut Robert N. Entman (Eriyanto, 2002:188). Analisis framing terdiri dari empat komponen penting: 1) Pendefinisian Masalah (*Define Problem*), yang mengidentifikasi bagaimana suatu peristiwa atau isu dipandang; 2) Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah (*Defining Causes*), yang menjelaskan penyebab peristiwa dan aktor yang terlibat; 3) Membuat Keputusan Moral (*Make Moral Judgement*), yang menilai nilai moral yang digunakan untuk menjelaskan masalah; dan 4) Menekankan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*), yang merumuskan solusi untuk mengatasi isu yang ada.

Tabel 1. Kerangka Analisis Framing Robert N. Entman

Pendefinisian Masalah (<i>Define Problem</i>)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah (<i>Defining Causes</i>)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Membuat Keputusan Moral (<i>Make Moral Judgement</i>)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
Menekankan Penyelesaian (<i>Treatment Recommendation</i>)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Keempat komponen ini digunakan peneliti untuk menganalisis definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi terkait framing pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 dalam kasus AGH. Pernyataan sikap yang dimaksud adalah dua pernyataan resmi dari SMA Tarakanita 1 mengenai AGH. Pernyataan pertama, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2023, berisi pengakuan dari pihak sekolah bahwa Agnes Gracia Haryanto (AGH) merupakan peserta didik SMA Tarakanita 1. Selain itu, pihak sekolah juga menyatakan telah mengambil tindakan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk perlindungan anak.

Pernyataan kedua, yang dirilis pada 2 Maret 2023, mengonfirmasi bahwa sekolah telah menerima surat pengunduran diri AGH sebagai siswi SMA Tarakanita 1 secara resmi pada tanggal 28 Februari 2023.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis analisis framing dari Robert N. Entman, peneliti melakukan analisis terhadap data primer, yaitu teks pernyataan sikap dan wawancara mendalam dengan Ketua Tarakanita Crisis Center (TCC) sebagai informan. Hal ini bertujuan untuk memvalidasi isi framing dalam pernyataan resmi sekolah. Dengan demikian, analisis ini akan memberikan pemahaman

yang komprehensif mengenai framing yang dibangun oleh SMA Tarakanita 1 terkait kasus AGH.

Hasil dan Diskusi

SMA Tarakanita 1 Jakarta terseret dalam kasus penganiayaan David Ozora oleh pelaku Utama Mario Dandy sejak warganet di Twitter mengetahui kalau kasus ini juga melibatkan Agnes Gracia Haryanto (AGH) yang diduga dan disebut-sebut warganet dalam kicauannya sebagai peserta didik SMA Tarakanita 1 Jakarta. Kata “Agnes” dan “Tarakanita” sempat menjadi trending topic di Twitter pada Kamis malam, 23 Februari 2023 hingga Jumat pagi, 24 Februari 2023. Tak hanya trending di Twitter, media online pun mulai mengangkat isu ini dalam pemberitaannya.

Dalam kicauannya di Twitter, mayoritas warganet mempertanyakan sikap SMA Tarakanita 1 yang belum juga mengeluarkan pernyataan sikap setelah 3 institusi pendidikan lainnya, yakni SMA Taruna Nusantara (TN) Magelang, Universitas Prasetya Mulya dan SMA Pangudi Luhur (PL) Jakarta mengeluarkan pernyataan tegasnya terkait Mario Dandy. Netizen mendesak SMA Tarakanita 1 mengeluarkan pernyataan resminya terkait status AGH. Desakan netizen dan publikasi media di media online berhasil “memaksa” pihak SMA Tarakanita 1 Jakarta merilis pernyataan sikapnya pada Jumat siang 24 Februari 2023.

Selembar surat dengan kop surat Yayasan Tarakanita dan Sekolah Menengah Atas Tarakanita 1 yang disertai alamat lengkap sekolah dan logo Tarakanita ini diberi judul “Pernyataan Sikap”. Surat ini dibubuhi tanda tangan Kepala SMA Tarakanita 1, Sr Pauletta, CB, M.Pd dengan stempel resmi sekolah yang menandakan keasliannya dari institusi yang bersangkutan. Dalam pernyataan sikap tersebut, SMA Tarakanita 1 Jakarta mendasarkan keseluruhan pernyataan sikapnya yang berisi empat poin utama berdasarkan nilai-nilai ketarakanitaan. Pilihan untuk mendasarkan pernyataan sikap pada nilai-nilai ketarakanitaan inilah yang dinamakan framing.

Menurut Eriyanto (2002: 10), pada dasarnya framing adalah metode untuk mengetahui bagaimana cara bercerita (*story telling*) media atas peristiwa, dengan melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Namun demikian, organisasi juga bisa melakukan framing dalam pesan-pesan komunikasi yang mereka sampaikan. Pernyataan yang disampaikan oleh organisasi, baik itu melalui siaran pers, *website* perusahaan atau pernyataan sikap, juga merupakan sebuah konstruksi atas realitas. Organisasi mengemas pesan yang mereka sampaikan dengan bingkai (*frame*) tertentu bertujuan untuk mendefinisikan suatu peristiwa atau isu dan bertujuan untuk memengaruhi opini publik sehingga tercipta citra organisasi yang positif (Kriyantono, 2015: 213, 316).

Berdasarkan kategori topik, terdapat empat pesan utama dalam pernyataan sikap dalam kasus AGH. Empat pernyataan tersebut meliputi: (1) keprihatinan dan empati atas penganiayaan yang dialami David Ozora dan pada saat yang sama berdoa untuk kesembuhannya; (2) pernyataan tegas bahwa kekerasan tidak termasuk dalam nilai-nilai ketarakanitaan. Karena itulah, Tarakanita tidak mentolerir tindakan perundungan dalam bentuk apapun oleh peserta didik baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah; (3) disposisi Tarakanita yang menghormati dan mendukung proses hukum untuk penegakan keadilan; (4) tindakan pada AGH sesuai aturan sekolah dan dengan memperhatikan

Undang-Undang terkait, antara lain tentang perlindungan anak. Gambar 1 berikut ini merupakan salinan pernyataan tersebut.



Gambar 1. Pernyataan Sikap SMA Tarakanita 1 pada Tanggal 24 Februari 2023

Sumber: <https://www.kalderanews.com/>

Meminjam framing tools dari Entman, teks tersebut dapat dianalisis dalam beberapa elemen. Elemen pertama adalah *define problems* atau pengidentifikasian masalah (Eriyanto, 2002:189). Elemen ini merupakan *master frame* atau bingkai yang paling utama. *Define problems* menjelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh seorang *Public Relations (PR) officer*. Pendefinisian masalah dari pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta bukan sekadar pengakuan bahwa AGH adalah peserta didik Tarakanita, tetapi lebih mendalam lagi dengan menekankan bahwa kekerasan dan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah atau di luar sekolah bertentangan dengan nilai-nilai Ketarakanitaan yang dihayati oleh sekolah. Apalagi dalam kasus ini diduga (pada waktu pernyataan sikap dikeluarkan status hukumnya belum jelas) melibatkan peserta didik maka sikap yang adil perlu dikedepankan. Informan mengakui pihak Tarakanita melakukan kajian pbingkai kasus ini dengan hati-hati, apalagi AGH ini baru 6 bulan di Tarakanita (SMA Kelas 1).

“Dalam kasus ini bahkan dalam menata kata ‘dan atau’ di surat itu (pernyataan sikap-red) menjadi persoalan besar. Karena (sadar-red) akan dibaca oleh publik dan media maka harus hati-hati...Setelah perdebatan panjang akhirnya kita memegang *value* Tarakanita sebagai pegangan utama dengan mempertimbangan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita juga telah menelusuri sistem peradilan anak dan pendidikan”

(In-depth interview pada 15 Mei 2023).

Dalam konteks pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta, masalah dan sumber masalah, yaitu penyebab atau faktor-faktor yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang terjadi pada saudara David Ozora, tidak dijelaskan secara eksplisit. Isi

pernyataan Tarakanita lebih menekankan sikap dan penegasan nilai-nilai Tarakanita serta tindakan yang telah diambil terhadap siswa yang terlibat.

Namun demikian, dalam analisis framing, *defining causes* dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang secara implisit terkait dengan masalah yang didefinisikan. Dalam hal ini, Tarakanita menyadari bahwa bukan ranahnya untuk memberikan penjelasan atau pernyataan sikap. Tarakanita menempatkan diri dalam posisi untuk peserta didiknya yang diduga terlibat.

Faktor-faktor penyebab kekerasan memang tidak dijelaskan secara eksplisit dan dapat menjadi subjek analisis lebih lanjut untuk diidentifikasi dan dipahami. Namun, Tarakanita mengambil sikap bijaksana dengan tidak membuat pernyataan yang terlalu luas yang berpotensi menimbulkan blunder. Secara implisit, Tarakanita menegaskan bahwa publik sebenarnya sudah tahu siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus kekerasan ini, seperti terungkap dalam kalimat pertama pernyataan sikapnya yang berbunyi, "Berkenaan dengan masalah viral saat ini yang melibatkan Agnes Gracia Haryanto...".

Tools selanjutnya adalah penilaian moral. Membuat penilaian moral (Eriyanto, 2002:191) merupakan elemen framing yang digunakan untuk membenarkan atau memberikan argumentasi pada definisi masalah yang telah dibuat. Setelah masalah didefinisikan dan penyebab ditentukan, diperlukan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Evaluasi etis atau penilaian moral terhadap kasus yang melibatkan AGH di SMA Tarakanita 1 Jakarta secara tegas menekankan bahwa kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan kemanusiaan tidak dapat diterima. Tarakanita menghormati dan melindungi integritas serta martabat setiap individu, termasuk menghindari perundungan dan tindakan kekerasan. Tarakanita percaya bahwa setiap tindakan kekerasan harus ditangani secara adil melalui proses hukum yang tepat agar keadilan dapat ditegakkan.

Terakhir, analisis framing Entman menyoroti bagaimana rekomendasi yang diajukan dalam sebuah berita. *Treatment recommendation* atau penekanan penyelesaian masalah (Eriyanto, 2002:191) merupakan elemen yang digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan (dalam hal ini, public relations) dan jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Dalam pernyataan sikapnya, SMA Tarakanita 1 Jakarta menegaskan telah mengambil tindakan terhadap AGH sesuai dengan aturan sekolah dan dengan memperhatikan undang-undang terkait, antara lain mengenai perlindungan anak. Tarakanita tidak menyebutkan secara jelas dan konkret tindakan apa yang diambil terhadap AGH ini, tetapi mendasarkan tindakan tersebut pada aturan sekolah dan undang-undang yang berlaku. Di sinilah netizen mulai bertanya-tanya dan tidak puas dengan pernyataan ini, sementara harapan dan desakan netizen adalah agar AGH dikeluarkan dari sekolah.

Dalam wawancara mendalam dengan Humas Tarakanita sebagai informan, ditemukan bahwa penting bagi Tarakanita untuk mengambil sikap yang bijaksana dan tidak mengamini setiap keinginan serta desakan warganet. Informan dalam wawancara tersebut pada Senin, 15 Mei 2023, mengakui bahwa pihak Tarakanita mengambil tindakan terhadap AGH sesuai dengan koridor pendidikan. Informan menyatakan:

“Pertimbangannya adalah status hukumnya Agnes belum jelas. Waktu itu statusnya masih menjadi saksi. Menurut UU Perlindungan Anak, anak ini belum ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya ini masih menjadi permasalahan kenakalan anak biasa yang harus dicover oleh sekolah karena sekolah itu tempat mendidik anak yang tidak baik menjadi baik. Prinsipnya kami akan melakukan tindakan hukum, tetapi jangan sampai melanggar hukum juga. Kalau kami melepaskan Agnes dengan dikeluarkan dari sekolah sebagai siswa, pada saat yang sama kami melanggar UUD terkait hak pendidikan anak. Dinyatakan salah sekali pun, dia tetep anak yang berhak atas pendidikan. Di sistem peradilan anak juga akan dilakukan restorative justice. Anak yang berkonflik dengan hukum dan dinyatakan bersalah, tetap ada perlakuan khusus terkait statusnya sebagai anak. Kalau Agnes dikeluarkan maka akan banyak pelanggaran yang dilakukan. Pilihan tidak mengeluarkan Agnes memang tidak populer. Kami berpandangan tanpa dihukum pun, Agnes waktu itu sudah dihukum banyak orang.”

Secara lebih sederhana dan ringkas, pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta pada Jumat siang, 24 Februari 2023 tersebut dalam skema pisau bedah analisis framing Roberts N. Entman terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Analisis Framing Robert N. Entman pada Pernyataan SMA Tarakanita 1 Jakarta pada 24 Februari 2023 (Hasil Olahan Peneliti)

Pendefinisian Masalah (<i>Define Problem</i>)	Kekerasan dan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah atau di luar sekolah bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tarakanita-an yang dihayati oleh sekolah.
Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah (<i>Defining Causes</i>)	Tidak dituliskan secara eksplisit dalam pernyataan sikap karena bukan ranah Tarakanita, tetapi secara implisit pihak Tarakanita menegaskan publik tahu masalah dan sumber masalahnya.
Membuat Keputusan Moral (<i>Make Moral Judgement</i>)	Kekerasan dan perundungan bertentangan dengan nilai-nilai etis dan kemanusiaan. Tarakanita menghormati dan melindungi integritas individu serta menjunjung tinggi keadilan dan penegakan hukum.
Menekankan Penyelesaian (<i>Treatment Recommendation</i>)	Tindakan terhadap AGH sesuai aturan sekolah dan dengan memperhatikan Undang-Undang terkait, antara lain tentang perlindungan anak.

Tak berhenti pada surat pernyataan sikap tanggal 24 Februari 2023, SMA Tarakanita 1 Jakarta dalam waktu kurang dari satu minggu, tepatnya enam hari setelah surat tersebut (2 Maret 2023), mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada orang tua/wali siswa kelas X, XI, dan XII mengenai pemberhentian AGH sebagai peserta didik. Surat edaran ini menarik untuk dianalisis karena berkaitan dengan status kasus AGH yang masih menggantung dalam pernyataan sikap Tarakanita sebelumnya.

Pada hari yang sama, yakni Kamis, 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya menetapkan AGH (15 tahun) sebagai pelaku dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tepatnya di Pasal 1 ayat 3.

Anak di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, atau biasa disebut pelaku.

Ada perubahan status bagi AGH yang awalnya dianggap anak berhadapan dengan hukum, kini naik status menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain, pelaku, karena anak di bawah umur tidak boleh disebut tersangka. Menariknya, meskipun surat edaran ini bersifat internal dan ditujukan kepada orang tua/wali siswa kelas X, XI, dan XII, karena memiliki nilai berita yang tinggi, sejumlah media mengangkatnya menjadi bahan pemberitaan. Jika dianalisis secara ilmiah, surat edaran ini juga mencerminkan pembingkaihan (framing) atas kasus, sebagaimana terungkap dalam analisis Robert N. Entman berikut ini.



Gambar 2. Surat Edaran Pemberitahuan Pemberhentian Sebagai Peserta Didik pada 2 Maret 2023
Sumber: <https://www.kalderanews.com/>

Secara ringkas, surat edaran SMA Tarakanita 1 Jakarta pada Kamis, 2 Maret 2023 tersebut jika dibedah dengan pisau analisis framing Roberts N. Entman akan terurai dalam Tabel 3.

Secara implisit, sebenarnya terungkap motif di balik surat edaran untuk orang tua/wali siswa kelas X, XI, dan XII, yang bukan sekadar pemberitahuan bahwa AGH telah menyatakan mengundurkan diri. Dari elemen Make Moral Judgement tersirat bahwa akibat kasus AGH ini, proses pembelajaran peserta didik tidak berjalan dengan baik, aman, dan nyaman. Pihak SMA Tarakanita 1 Jakarta ingin menenangkan dan meyakinkan orang tua/wali siswa bahwa kasus ini telah ditangani dengan baik.

Tergelitik oleh motif ini, peneliti melakukan wawancara mendalam lanjutan pada Minggu, 18 Juni 2023, dengan informan utama, yaitu Ketua Tarakanita Crisis Center (TCC), Aurelius Arya Saputra. Informan membenarkan bahwa kasus ini mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Kompleks sekolah ini bukan hanya untuk anak-anak SMA, tetapi juga mulai dari kelas 1 SD. Kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah terganggu karena banyak media yang datang ke gerbang sekolah, banyak orang tua yang khawatir, dan bahkan siswi mulai merasa tidak nyaman memakai seragam sekolah karena wartawan berusaha menggali informasi dari mereka. Keamanan siswa ke sekolah juga mulai terusik karena ojek dan taksi online mulai melakukan cancel culture,” jelas Aurelius Arya Saputra.

Tabel 3. Analisis Framing Robert N. Entman pada Pernyataan SMA Tarakanita 1 Jakarta pada 2 Maret 2023 (Hasil Olahan Peneliti)

Pendefinisian Masalah (<i>Define Problem</i>)	Pengunduran diri AGH sebagai siswi SMA Tarakanita 1 Jakarta telah diterima secara resmi oleh pihak sekolah karena yang bersangkutan terlibat kasus hukum.
Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah (<i>Defining Causes</i>)	AGH terlibat kasus hukum, namun tidak eksplisit dijelaskan kasus hukumnya.
Membuat Keputusan Moral (<i>Make Moral Judgement</i>)	Pentingnya menganggap anak sebagai anugerah dan titipan Tuhan. Mengisyaratkan bahwa peristiwa ini memberikan pengalaman berharga bagi pendidik dan orang tua. Mendorong kerjasama dalam kasih untuk memastikan proses pembelajaran peserta didik berjalan baik, aman, dan nyaman.
Menekankan Penyelesaian (<i>Treatment Recommendation</i>)	Pihak sekolah mengembalikan pendidikan AGH kepada orang tua dan keluarga dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil temuan data, beberapa kesimpulan utama dapat diambil dari pernyataan sikap Tarakanita. Pernyataan dimulai dengan ungkapan keprihatinan dan empati dari SMA Tarakanita 1 Jakarta terhadap tindakan kekerasan yang dialami oleh saudara David Latumahina. Pernyataan ini menarik karena tidak hanya bertujuan untuk menarik perhatian publik, tetapi juga menegaskan bahwa fokus utamanya adalah sikap tegas yang tidak mentolerir kekerasan dan memberikan dukungan kepada korban. Hal ini menguatkan bahwa kekerasan bukan nilai yang dijunjung tinggi oleh Tarakanita. Kekerasan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai sekolah, dan perundungan merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, SMA Tarakanita 1 Jakarta menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan untuk menegakkan keadilan. Dalam konteks ini, penanganan tindakan kekerasan harus dilakukan dengan adil. Tindakan konkret terhadap siswa yang terlibat telah diambil sesuai dengan peraturan sekolah dan memperhatikan undang-undang perlindungan anak yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa penekanan utama adalah perlunya penegakan aturan sekolah dan perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan. Dengan pendekatan ini, pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta memberikan sudut pandang yang jelas mengenai kejadian kekerasan, menegaskan penolakan terhadap perundungan, serta menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan anak dalam konteks nilai-nilai Tarakanita.

Selanjutnya, diagnosis penyebab menjadi penting. Diagnosis penyebab atau mencari akar masalah (Eriyanto, 2002:190) merupakan elemen framing untuk menentukan siapa atau apa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Cara peristiwa ini dipahami akan mempengaruhi pandangan terhadap apa yang menjadi penyebab masalah serta siapa yang dianggap bertanggung jawab.

Pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan biasa, melainkan respons cepat dalam menghadapi krisis yang mendesak. Menariknya, pernyataan ini dikeluarkan kurang dari 24 jam setelah kasus tersebut pertama kali terjadi.

Respon yang sangat cepat ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini sebagai krisis PR. Krisis di sini mengacu pada situasi yang tidak stabil dengan potensi hasil yang tidak diinginkan (Devlin, 2006), yang dapat mengancam tujuan-tujuan organisasi (Seeger, Sellnow, & Ulmer, 1998).

Upaya untuk menangani krisis tersebut umumnya melibatkan serangkaian aktivitas manajemen krisis. Gary Kreps (1990) menyatakan bahwa manajemen krisis adalah proses yang menggunakan kegiatan public relations untuk mengatasi dampak negatifnya. Tarakanita telah memiliki mekanisme khusus dalam menghadapi krisis, termasuk pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab untuk menjaga citra positif sekolah. Dalam kasus AGH, Tarakanita membentuk tim yang disebut Tarakanita Crisis Center (TCC) yang dipimpin oleh Aurelius Arya Saputra. Berikut ini adalah kutipan dari hasil wawancara dengan ketua TCC.

“Yayasan Tarakanita memiliki 60 sekolah, di mana setiap sekolah dikelola oleh masing-masing kantor wilayah pada setiap propinsi. Di DKI Jakarta ada 18 unit sekolah termasuk SMA Tarakanita 1 tempat siswi AGH bersekolah. Sehingga secara organisatoris di tingkat pusat ada kantor pusat, di bawahnya ada kantor wilayah, dan bawah lagi ada unit sekolah. Terkait kasus AGH berikut langkah dan respon Yayasan. Begitu unit sekolah mendapatkan informasi perihal salah satu siswinya (AGH) terlibat masalah hukum dan berpotensi menjadi viral maka pimpinan sekolah menyampaikan informasi ke Kantor Wilayah Jakarta yang segera disampaikan ke kantor pusat untuk mendapatkan advokasi, baik pendampingan untuk tindakan hukum, mitigasi operasional sekolah, maupun antisipasi dan penanganan berita dan opini, serta manajemen informasi pada *stakeholder* (peserta didik, orang tua, komite sekolah, pengawas, dinas pendidikan, ikatan alumni) dan juga pers.... Kami membentuk Tim Tarakanita Crisis Center (TCC) yang terdiri dari unsur fungsi pendidikan, SDM, humas dan IT kantor pusat, operasional kantor wilayah, pimpinan SMA 1 dan penasehat hukum”
(Hasil in-depth interview dengan Ketua Tarakanita Crisis Center (TCC), Aurelius Arya Saputra pada Minggu, 18 Juni 2023).

Dari segi kualitas, isi pernyataan sikap yang singkat dan padat telah dirancang secara cermat untuk menanggapi isu yang dihadapi. Jika dianalisis menggunakan kerangka framing Roberts N. Entman, pembentukan pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta akan terurai secara mendalam. Dengan pemilihan kata dan struktur kalimat yang tepat, SMA Tarakanita mengarahkan interpretasi publik untuk menyoroti bahwa inti dari peristiwa ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai Tarakanita dan pelanggaran hukum.

Namun, pada bagian kedua pernyataan sikap, SMA Tarakanita memilih untuk tidak secara eksplisit menyebutkan pelanggaran nilai-nilai atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku. Sebaliknya, teks tersebut mengasumsikan bahwa publik telah mengetahuinya, sehingga penjelasan detil dianggap tidak perlu. Penggunaan gaya bahasa eufemisme ini mencerminkan upaya untuk menghindari kesan berlebihan dan

menjelaskan secara terperinci, dengan harapan dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap publik.

Penilaian moral yang dilakukan menunjukkan upaya universalisasi peristiwa dengan menggunakan ungkapan seperti "anak sebagai titipan Tuhan", "pelanggaran kode etik", dan "penegakkan hukum". Pada bagian akhir, terlihat bahwa rekomendasi penyelesaian masalah menggunakan pendekatan hukum dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Keseluruhan teks mengindikasikan bahwa seluruh isu dilihat melalui lensa hukum dan nilai-nilai normatif. Teks tersebut juga mencerminkan upaya implisit untuk menghindari kesan bahwa pihak sekolah memiliki andil dalam kasus tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data primer dari surat pernyataan sikap dan wawancara mendalam dengan informan Tarakanita, seperti yang diuraikan dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa SMA Tarakanita 1 Jakarta melakukan framing dalam pernyataan sikapnya terkait kasus yang melibatkan salah satu siswinya, berinisial AGH. Dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman, terlihat jelas isu yang ditonjolkan dalam pernyataan sikap tersebut, yakni: (1) *define problem*: kekerasan dan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah atau di luar sekolah bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tarakanita-an yang dihayati oleh sekolah; (2) *make moral judgement*: kekerasan dan perundungan bertentangan dengan nilai-nilai etis dan kemanusiaan, karena itu Tarakanita menghormati dan melindungi integritas individu serta menjunjung tinggi keadilan dan penegakan hukum; (3) *treatment recommendation*: tindakan terhadap AGH dilakukan sesuai dengan aturan sekolah dan memperhatikan undang-undang terkait, antara lain mengenai perlindungan anak.

Di sisi *treatment recommendation*, melalui wawancara mendalam dengan informan Tarakanita, ditemukan fakta baru bahwa keputusan untuk tidak mengeluarkan AGH dalam surat pernyataan sikap pada 24 Februari 2023 didasarkan pada banyak pertimbangan dari koridor pendidikan, mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD) terkait hak pendidikan anak, UU Perlindungan Anak, status hukum AGH yang belum jelas, dan terutama tanggung jawab sekolah sebagai tempat mendidik anak untuk menjadi lebih baik.

Sementara itu, kemunculan surat edaran SMA Tarakanita 1 Jakarta yang ditujukan kepada orang tua/wali siswa kelas X, XI, dan XII pada Kamis, 2 Maret 2023, menunjukkan bahwa isinya bukan sekadar pemberitahuan bahwa AGH telah menyatakan mengundurkan diri, tetapi merupakan langkah strategis pihak sekolah untuk menenangkan orang tua/wali siswa karena kegiatan belajar mengajar (KBM) selama ini memang terganggu. Terdapat kecenderungan umum bahwa pihak sekolah tidak menunjukkan penyesalan bahwa terdapat kemungkinan bahwa sekolah baik secara langsung atau tidak langsung memiliki andil yang memungkinkan peristiwa tersebut dapat terjadi.

Temuan baru lainnya dalam kajian ini adalah bahwa Tarakanita dapat menjadi salah satu *role model* dalam dunia pendidikan dalam menangani krisis. Seperti yang dilakukan oleh Tarakanita dengan memiliki Tarakanita Crisis Center (TCC), penting bagi institusi pendidikan untuk memiliki *public relations* (PR) yang dapat mengelola krisis, terutama dengan tim khusus yang mampu mengatasi krisis untuk menjaga reputasi dan

citra organisasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya kajian manajemen krisis PR melakukan perbandingan terhadap peristiwa sejenis dengan *treatment* yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda pula.

Referensi

- Arbi, I.A. (2023, 24 Februari). "Saat Menkeu Sri Mulyani Turun Tangan Minta Maaf karena Ulah Mario, "Perilaku Ini Mencederai Kemenkeu!". Kompas.com. Diakses pada 1 Mei 2023, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/24/17394971/saat-menkeu-sri-mulyani-turun-tangan-minta-maaf-karena-ulah-mario?page=all>.
- Aris, S., Hartiana, T. I. P., & Revia SF, B. (2018). Bingkai Krisis Qz8501 Pada Press Release Airasia Indonesia Yang Dimuat Dalam Situs Website www.qz8501.airasia.com. KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi, 7(1), 67–94.
- Devlin, E. S. (2006). Crisis management planning and execution. New York: CRC Press.
- Eriyanto. (2002). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Hallahan, K. (1999). Seven models of framing: Implications for public relations. *Journal of Public Relations Research*, 11(3), 205–242.
- Hidayat, M. T. (2021). Personal Branding Dalam Komunikasi Publik Pemerintah Analisis Framing Karakter Personal Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Siaran Pers Kementerian Tahun 2020. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 5(1), 65–71.
- Ibad, K. (2016). Analisis Framing Berita Banjir Oleh Humas Di Website Pemerintah Kota Samarinda. *Journal Ilmu Komunikasi*, 4(3), 520–534.
- Karunia, A.M. dan Ika, A. (2023, 24 Februari). "Humas SMA Taruna Nusantara Bantah Mario Dandy Lulusan Sekolahnya". Kompas.com. Diakses pada 1 Mei 2023, dari <https://money.kompas.com/read/2023/02/24/083000526/humas-sma-taruna-nusantara-bantah-mario-dandy-lulusan-sekolahnya>.
- Kriyantono, R. (2006). Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Kriyantono, R. (2008). PR Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kriyantono, R. (2012). Public Relations & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Kritis & Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kriyantono, R. (2014). Teori Public Relations Perspektif Barat Dan Lokal Aplikasi Penelitian dan Praktik. Jakarta: Kencana.
- Kriyantono, R. (2015). Public Relations, Issue & Crisis Management. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Noviansah, W. (2023, 24 Februari). "SMA Tarakanita 1 Tindak Siswi A Pacar Mario Dandy Penganiaya David". Detik.com. Diakses pada 1 Mei 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-6587027/sma-tarakanita-1-tindak-siswi-a-pacar-mario-dandy-penganiaya-david>.
-

- Permana, R.H. (2023, 26 Februari). "Pernyataan Sikap 3 Sekolah dan 1 Kampus Buntut Mario Dandy Aniaya David". Detik.com. Diakses pada 1 Mei 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-6589232/pernyataan-sikap-3-sekolah-dan-1-kampus-buntut-mario-dandy-aniaya-david>.
- Prasetya, N. M. (2018). Analisis Framing terhadap Pernyataan Resmi Kemenpora RI dan PSSI dalam Kasus Sanksi FIFA terhadap Indonesia. *Jurnal Komunikator*, 10(1), 1.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sambo, M. (2019). *Media Relations Kontemporer: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Seeger, M. W., Sellnow, T. L., & Ulmer, R. R. (1998). Communication, organization, and crisis. *Annals of the International Communication Association*, 21(1), 231–276.
- Sofyan, F. S. (2021). *Respon Krisis Pemerintah Provinsi Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Framing Terhadap Press Release Pemprov Bengkulu Periode Maret-Desember 2020)*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Zoch, L. M., & Molleda, J.-C. (2006). Building a theoretical model of media relations using framing, information subsidies, and agenda-building. *Public Relations Theory II*, 279–309.